

KATA PENGANTAR

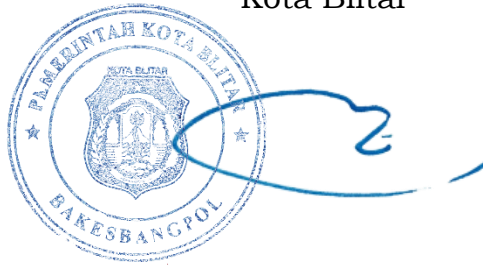
Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hanya dengan rahmat dan pertolongan-Nya lah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Blitar Tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan Good Governance dan Clean Government. Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara garis besar menyajikan informasi mengenai gambaran organisasi Bakesbangpol Kota Blitar, serta implementasi dokumen perencanaan dan kinerja seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), serta Perjanjian Kinerja.

Pencapaian kinerja Bakesbangpol Kota Blitar merupakan hasil kerjasama dan kerja keras dari berbagai pihak. Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bakesbangpol Kota Blitar tahun 2025 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2025 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Blitar, 5 Februari 2026

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Blitar



TOTO ROBANDIYO, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 196612041996031004

IKHTISAR EKSEKUTIF

Bakesbangpol Kota Blitar merupakan unsur pendukung tugas Walikota dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 yang di dalamnya memuat Visi dan Misi Pemerintah Kota Blitar, Bakesbangpol Kota Blitar mengemban satu misi Pemerintah Kota Blitar, yang pertama misi ke-1 (satu): **“Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan”**.

Dalam rangka mewujudkan Misi tersebut ditetapkan 1 (satu) tujuan dan 3 (tiga) Sasaran Strategis dari Bakesbangpol Kota Blitar yang harus dicapai sesuai target dimana untuk Sasaran Startegis pertama memiliki 2 (dua) indicator kinerja dan Sasaran Strategis ke 2 dan ke 3 masing-masing mempunyai 1 (satu) indikator kinerja. Berikut capaian kinerja yang telah dicapai pada tahun 2025:

Tujuan : Meningkatnya kehidupan masyarakat yang kodusif, demokratis serta berwawasan kebangsaan

Indikator Tujuan: Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Sasaran :

1. Sasaran I

Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat:

- a. Persentase kejadian SARA tertangani terealisasi 100% sama dengan target yang ditetapkan
- b. Persentase konflik sosial tertangani juga terealisasi 100% sama dengan target yang ditetapkan

2. Sasaran Strategis II:

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politik

- a. Persentase Ormas dan Orpol yang aktif teralisasi sebesar 90,34% diatas target yang ditetapkan yaitu 80,4%

3. Sasaran Strategis III:

Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah:

Nilai SAKIP Bakesbangpol tahun 2025 ditargetkan 84,99 dapat teralisasi 86,66

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bakesbangpol Kota Blitar merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian sasaran/kinerja utama yang dalam pelaksanaannya dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran oleh seluruh bidang. Pada Tahun 2025 anggaran yang teralokasi untuk Bakesbangpol Kota Blitar sebesar Rp. 8.267.140.832,00 telah terealisasikan sebesar Rp. 7.507.161.428,00 atau 90,81%. Program yang dilaksanakan dalam mengelola dana tersebut terdiri dari 6 (enam) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 42 (empat puluh dua) sub kegiatan.

Berikut tabel capaian kinerja, anggaran dan tingkat efisiensi:

Sasaran	Indikator Sasaran/Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi	Ket. Kinerja
Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	Persentase kejadian SARA tertangani	100	100	100	91,38	1,09	Sangat berhasil
	Persentase konflik sosial tertangani	100	100	100	97,22	1,03	Sangat berhasil
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politik	Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	80,4	90,34	112,36	99,38	1,13	Sangat berhasil
54W	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,99	86,66	101,96	87,26	1,17	Sangat berhasil

Dari analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian Sasaran/kinerja utama yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Bakesbangpol Kota Blitar tahun 2025 dapat dikatakan sangat berhasil walaupun masih dijumpai banyak kendala/hambatan dalam pelaksanaannya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN	5
D. DASAR HUKUM	5
E. ASPEK-ASPEK STRATEGIS	8
F. ISU-ISU STRATEGIS	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	11
A. RENCANA STRATEGIS 2021-2026	12
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	17
C. PROGRES TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI LKJiP TAHUN 2024	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	26
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA/ SASARAN	27
1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2025	28
2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 – 2025	36
3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA S.D AKHIR PERIODE RENSTRA	39
4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI NASIONAL (TARGET SPM)	40
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN (COST PER OUTCOME)..	41
1. ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN	42
2. PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN	43
3. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	44
C. PRESTASI/ PENGHARGAAN	45

BAB IV. PENUTUP..... 46

 A. KESIMPULAN 46

 B. LANGKAH PERBAIKAN 48

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja	13
Tabel 2.2 Strategi dan Kebijakan untuk mencapai Sasaran....	13
Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	14
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar	17
Tabel 2.5 Progres Tindak Lanjut Atas Rekomendasi LKJiP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2024	18
Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Tahun 2025	28
Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023, 2024 dengan Tahun 2025	36
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode RENSTRA	39
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Blitar	40
Tabel 3.5 Realisasi Anggaran Belanja	41
Tabel 3.6 Realisasi Anggaran untuk setiap Sasaran dan Program Tahun 2025	41
Tabel 3.7 Alokasi Per Sasaran Pembangunan	42
Tabel 3.8 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Per Sasaran	43
Tabel 3.9 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	44
Tabel 4.1 Rencana Tindak Lanjut LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2025	48

LAMPIRAN – LAMPIRAN

- A. Matrik Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
- B. Perubahan Rencana Kinerja Tahunan (P-RKT) Tahun 2025
- C. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- D. Pengukuran Kinerja Tahun 2025
- E. Daftar Ormas dan Orpol Kota Blitar Tahun 2025

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dinyatakan bahwa Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sesuai pasal 5 huruf e Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 disebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan salah satu unsur penyelenggaraan SAKIP.

Untuk selanjutnya petunjuk teknis Pelaporan Kinerja diatur secara detail dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini diamanatkan bahwa Kepala OPD menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang diliputi semangat akuntabilitas, Bakesbangpol Kota Blitar secara periodik setiap tahun menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai sarana mempertanggungjawabkan pelaksanaan Kinerja Utama Bakesbangpol Kota Blitar yang tertuang dalam bentuk Perjanjian Kinerja kepada pemberi mandat, dalam hal ini adalah pertanggungjawaban kepada Walikota Blitar. Di dalam laporan kinerja ini disampaikan hasil capaian Bakesbangpol Kota Blitar

secara terukur, sehingga LKjIP ini diproyeksikan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya misi ke-1 Pemerintah Kota Blitar yang diemban oleh Bakesbangpol Kota Blitar, yaitu: **Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan.** Dalam perspektif yang lebih luas, LKjIP ini dapat berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Bakesbangpol Kota Blitar.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2022 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar. Kedudukan Bakesbangpol merupakan unsur pendukung tugas Walikota dibidang kesatuan bangsa dan politik dan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Bakesbangpol mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- c. pelaksanaan evaluasi politik;
- d. penyusunan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri berdasar peraturan perundang-undangan; dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan;

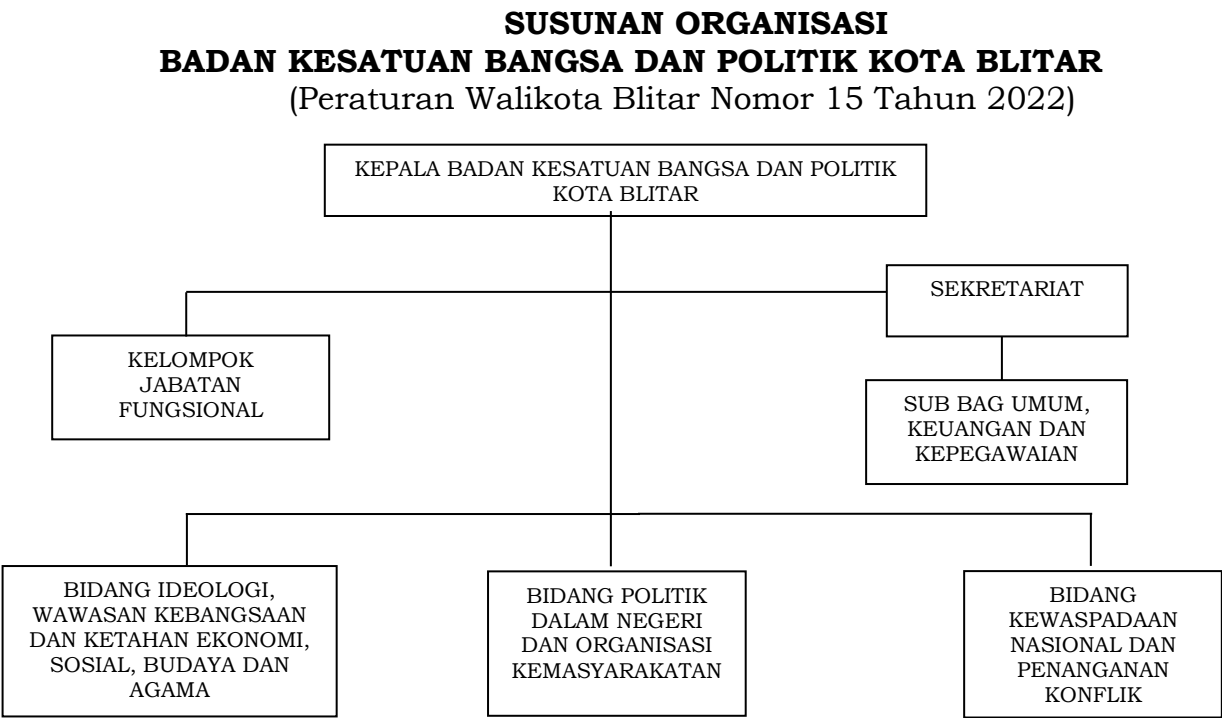
- f. Pengkoordinasian kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- g. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian tugas dibidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri berdasar peraturan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan;
- i. pelaksanaan pendataan, penyusunan kebijakan dan pembinaan peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik;
- j. pelaksanaan pendataan, analisa, pembuatan kajian, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya;
- l. pelaksanaan analisa guna peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan faslitasi penanganan konflik sosial;
- m. pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- n. penyusunan kebijakan penanganan SARA dan konflik sosial di Kota Blitar;
- o. perumusan kebijakan peningkatan keaktifan organisasi masyarakat dan organisasi politik di Kota Blitar;
- p. penyusunan kebijakan indeks kapasitas daerah;
- q. penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dilingkup badan kesatuan bangsa dan politik;
- r. perumusan pengukuran kepuasan pengguna layanan;
- s. pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kesatuan bangsa dan politik;

- t. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan kesatuan bangsa dan politik secara berkala melalui sub domain website Pemerintah Daerah;
- u. pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan tugas Badan;
- v. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
- w. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Selanjutnya susunan organisasi Bakesbangpol terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
- d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun struktur organisasi Bakesbangpol Kota Blitar adalah sebagai berikut:



C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2025 ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Sekretariat Daerah Kota Blitar pada Tahun 2025, dengan tujuan:

1. Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh pemerintah daerah maupun masyarakat;
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
3. Memberikan informasi guna penyempurnaan dokumen perencanaan serta kinerja periode yang akan datang;
4. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
5. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
6. Sebagai media dalam upaya menyempurnakan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju pemerintahan yang bersih (clean government), dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

D. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2025 berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Walikota Blitar Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026;
20. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
21. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
23. Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
24. Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

E. ASPEK-ASPEK STRATEGIS

Aspek-aspek Strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian sasaran/IKU Bakesbangpol Kota Blitar diantaranya:

1. Kondusifitas Kerukunan Umat Beragama
2. Peran aktif Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam deteksi dini potensi konflik
3. Adanya akses yang baik untuk infra struktur dan supra struktur Politik
4. Adanya koordinasi yang baik di jajaran Bakesbangpol Kota Blitar dengan Badan/Dinas/Kantor/Bagian terkait
5. Adanya bentuk jejaring sebagai wadah/koordinasi lintas sectoral
6. Partisipasi Parpol, Ormas, LSM dan Perguruan Tinggi dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan Demokrasi

F. ISU-ISU STRATEGIS

Isu – isu strategis adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD di masa datang, suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu

memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin di hadapi ke depan oleh masyarakat, sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran.

Bakesbangpol Kota Blitar dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya senantiasa dipengaruhi lingkungan yang bersifat strategis yakni kondisi, situasi, keadaan peristiwa yang menjadi isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Isu-isu strategis tersebut antara lain:

1. Perlunya penguatan koordinasi dan dialog antara FKUB dengan pemerintah daerah, Forkompinda, tokoh agama dan organisasi sosial kemasyarakatan untuk menjaga kerukunan, toleransi antar umat beragama dan harmonisasi.
2.
 - a. Perlunya koordinasi aktif dengan stakeholder, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi terkait, untuk pengumpulan data dan informasi yang akurat tentang konflik untuk memahami akar masalah dan mengembangkan strategi penanganan konflik secara tepat dan efektif;
 - b. Mengaktifkan Timdu Penanganan Konflik Sosial di tingkat daerah untuk menangani konflik secara cepat dan efektif;
 - c. Mengadakan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya kewaspadaan dini dan penanganan konflik yang efektif kepada masyarakat dan stakeholder terkait;
 - d. Optimalisasi Peran Media Massa dengan menggunakan media massa untuk menyebarkan informasi yang akurat dan objektif tentang konflik, serta mempromosikan nilai-nilai toleransi dan perdamaian.
3. Pembentukan Tim untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi, pemantauan dan pengumpulan data informasi tentang ormas dan orpol untuk mengetahui kegiatan, keberadaan dan keaktifannya sehingga dapat meningkatkan stabilitas dan keamanan masyarakat.

4. a. Optimalisasi pemanfaatan capaian pada LKJiP agar digunakan dalam penentuan strategi maupun penentuan target kinerja pada dokumen perencanaan selanjutnya.
- b. Perlunya monev kinerja melalui pengukuran kinerja sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai dasar dalam menentukan strategi dan pengambilan keputusan agar target kinerja dapat tercapai

Dengan mengetahui isu-isu strategis yang dihadapi, diharapkan dapat menganalisis lingkungan internal yang perlu mendapat fokus lebih untuk ditingkatkan, strategi yang relevan untuk meningkatkan, serta pengembangan organisasi yang mengarah pada pencapaian tujuan.

BAB 11

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Perencanaan adalah suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai atau tujuan di masa depan dan juga untuk menentukan beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. Perlunya suatu perencanaan yang strategis untuk mencapai tujuan dimana rencana strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu. Rencana Strategis merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai perwujudan Visi dan Misi Kepala Daerah. Di dalam Rencana Strategis ini termuat tujuan, sasaran dan program yang mengacu pada visi, misi, tujuan serta sasaran RPJMD Kota Blitar.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan kinerja tujuan, sasaran, dan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Bakesbangpol Kota Blitar 2021-2026 telah mempertimbangkan baik tentang kondisi dan potensi serta prospek perkembangan sebagai kekuatan untuk menentukan kunci keberhasilan maupun yang menyangkut hambatan, kendala, dan resiko yang dihadapi sebagai kelemahan dan tantangan yang harus ditanggulangi. Berdasarkan Visi pembangunan Kota Blitar yang ingin diwujudkan pada periode 2021-2026 yang tertuang dalam RPJMD Kota Blitar periode (2021-2026) adalah: **“KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat”**. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusunlah misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya –upaya yang akan dilaksanakan, dimana Bakesbangpol Kota Blitar berada pada misi kesatu, yaitu: **“Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan”**.

Mengacu dari misi inilah disusun tujuan, sasaran dan indikator kinerja Bakesbangpol Kota Blitar yang akan dicapai selama periode perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

NO	Tujuan		Sasaran	Indikator Sasaran
	Uraian	Indikator		
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kehidupan masyarakat yang kodusif, demokratis serta berwawasan kebangsaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	Persentase kejadian SARA tertangani
				Persentase konflik sosial tertangani
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politik	Persentase Ormas dan Orpol yang aktif
2.	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Untuk mencapai sasaran diperlukan strategi dan kebijakan yang harus dilakukan:

Tabel 2.2
Strategi dan Kebijakan untuk mencapai sasaran

MISI I : Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan			
Tujuan	Sasaran	Strategis	Kebijakan
Meningkatnya kehidupan masyarakat yang kodusif, demokratis serta berwawasan kebangsaan	Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	Mengoptimalkan penanganan apabila ada kejadian SARA	Koodinasi aktif dengan Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB), dan intansi terkait
		Mengoptimalkan penanganan apabila ada konflik sosial	1. Sinergi, harmonisasi pengampu kebijakan / Stake holder dalam penanganan konflik; 2. Optimalisasi peran Timdu Penanganan Konflik Sosial 3. Sosialisasi, edukasi tentang pentingnya kewaspadaan dini; 4. Optimalisasi peran media massa
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politik	Meningkatkan peran orpol dalam Pendidikan politik dan memantau keaktifan ormas	Meningkatkan koordinasi dan pemantauan kepada ormas dan orpol
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah berbasis kinerja 2. Membudayakan monev kinerja secara berjenjang

Sedangkan program-program dan kegiatan yang dilaksanakan selama periode RENSTRA adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	
Meningkatnya kehidupan masyarakat yang kodusif, demokratis serta berwawasan kebangsaan	Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
		1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		2	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
		3	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
		4	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka
		5	Pembentukan Paskibraka
		6	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila
		7	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila
		8	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
		1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
		2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	

		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial
		1 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		2 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
		3 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
		1 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah
		2 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		3 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
		1 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Meningkatnya Tata	Meningkatnya	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kelola Perangkat Daerah	Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
		1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
		2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	
		1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		8	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
		1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
		2	Pengadaan Mebel
		3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		4	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
		1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		2	Pemeliharaan Mebel
		3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		4	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
		5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah dengan Walikota Blitar sebagaimana terlampir. Perjanjian kinerja didasarkan pada sasaran strategis, indikator dan target yang telah dituangkan dalam rencana kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Blitar

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	Persentase kejadian SARA tertangani	100 %
		Persentase konflik sosial tertangani	100 %
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politik	Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	80,4%
3.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP PD	A (84,99)

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut di dilaksanakan 6 (enam) program dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 8.267.140.832,00.

C. PROGRES TINDAK LANJUT ATAS REKOMENDASI LKJiP TAHUN 2024

Sebagai bentuk keberlanjutan atas pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar tahun 2025, maka sudah ditetapkan langkah-langkah perbaikan dalam rangka pencapaian kinerja pada tahun-tahun berikutnya atas kendala atau permasalahan yang dihadapi. Guna mengetahui progress langkah-langkah perbaikan tersebut, maka perlu kami laporkan hasilnya sebagai berikut:

Tabel 2.5
Progres Tindak Lanjut Atas Rekomendasi LKJiP
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Blitar
Tahun 2024

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
1	Belum optimalnya komunikasi dan silaturahmi antar umat beragama	a. Perlu melakukan sosialisasi yang berkelanjutan yang tujuannya mampu mewujudkan sikap toleransi dan kerukunan antar umat beragama b. Peran stakeholder dalam memasyarakatkan moderasi beragama c. Mengoptimalkan peran FPK Tingkat Kota Blitar dan FPK Tingkat Kecamatan sebagai wadah komunikasi antar Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan d. Meningkatkan interaksi antar Pemuka Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan guna	- Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan - Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	√		Pada tahun 2025 telah dilaksanakan: a. Sosialisasi wawasan kebangsaan b. FKUB menyelenggarakan dialog kebangsaan dan kerukunan umat beragama dan kunjungan ke tempat-tempat ibadah c. Membentuk FPK tingkat Kecamatan d. Doa Bersama lintas agama dan suku pada saat tahun baru, Hari Kemerdekaan dan Haul Bung Karno

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
		menumbuhkan sikap inklusif (terbuka) antar Pemuka Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan yang diharapkan akan diikuti oleh masing-masing anggota komunitas				
2	Kurang optimalnya partisipasi masyarakat untuk menciptakan kondisi yang aman dan tentram	a. Secara intens menggali informasi dari masyarakat b. Sinergi, harmonisasi pengampu kebijakan / <i>Stake holder</i> dalam penanganan konflik; c. Optimalisasi peran Timdu Penanganan Konflik Sosial d. Sosialisasi, edukasi tentang pentingnya kewaspadaan dini; e. Optimalisasi peran media massa f. Penguatan kewaspadaan dini Masyarakat g. Penguatan peran FKDM tingkat	- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial - Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang	√		Pada tahun 2025 telah dilaksanakan: a. Pengumpulan bahan keterangan (pulbaket), koordinasi, konfirmasi dengan toga/tomas/perangkat. contoh: Pulbaket di wilayah kelurahan Kepanjenlor terkait isu/potensi konflik Tower operator seluler Jl. Rinjani b. menyelenggarakan rakor pengamanan jelang Idulfitri 1446 H/2025 M c. menyelenggarakan rakor forkopimda terbatas di Kantor PCNU Kota Blitar dalam menyikapi insiden kerusuhan massa pada Agustus 2025;

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
		kecamatan/kota dan Tim Kewaspadaan Dini Kecamatan/Kota	Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah			d. Bersama FKDM Kota Blitar melaksanakan diseminasi kewaspadaan dini masyarakat di 3 kecamatan se-Kota Blitar e. mengikutsertakan perwakilan media online/cetak wilayah Blitar dalam acara Ngobras Walikota di Terminal Patria. f. melaksanakan giat Penguatan Kewaspadaan Dini dalam rangka Binkom Cegah Konflik Sosial 2025 pada 1 September 2025 di Makodim 0808; g. melaksanakan pertemuan Formal dan non formal dengan anggota FKDM Kota /Kecamatan terkait pelaksanaan Tupoksi FKDM
3	Perlunya meningkatkan Pemberdaya	a. Sosialisasi penggunaan aplikasi e-landa untuk Ormas dan Orpol guna secara rutin dan berkala melaporkan kegiatannya dan	- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	√		Pada tahun 2025 telah telah dilaksanakan a. sosialisasi e-landa kepada ormas dan orpol

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
	an Ormas dan Orpol	perubahan yang terjadi dalam struktur organisanya termasuk perpindahan kantor sekretariat/keberadaannya. b. Dibentuk Tim Terpadu Pengawasan Ormas c. Diadakan kegiatan yang melibatkan Orpol yang ada di Kota Blitar	- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik - Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			b. Penyusunan SK Tim Terpadu Pengawasan Ormas c. Pembagian takjil di bulan Ramadhan bersama Ormas dan Orpol
			- Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	√		

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
			- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			
4	Pemberantasan penyakit sosial masyarakat	a. Sosialisasi anti miras dan narkoba b. Patroli gabungan Kost-kostan dan tempat hiburan	- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya - Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat	√		Pada tahun 2025 telah dilaksanakan: a. Sosialisasi anti miras dan narkoba di dua Kelurahan Klampok dan Tanjungsari b. Terciptanya kondusifitas wilayah

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
			Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			
5.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	a. Memanfaatkan aplikasi sukma-e Jatim dalam pengukuran SKM Perangkat Daerah b. Melaksanakan review perencanaan dengan monev berjenjang c. Pembagian tugas dan tanggung jawab kepada seluruh tim SAKIP dalam penyusunan dokumen d. Menyusun Tindak Lanjut rekomendasi monitoring pencapaian kinerja jangka menengah. e. Menyusun Laporan Hasil monitoring Tindak Lanjut rekomendasi monitoring pencapaian kinerja jangka	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	√		Pada tahun 2025 telah dilaksanakan: a. Pengambilan Nilai SKM dari aplikasi sukma-e Jatim b. Review Renja, P-Renja secara berjenjang c. Pembagian tugas mempercepat penyelesaian pengerjaan SAKIP dan diperoleh nilai 86,66 dengan peringkat ke -6 d. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan e. Menyusun laporan Monev RKPD f. Menyusun ranwal Renstra 2025-2029 g. LKJiP 2024 telah disusun h. Peningkatan capaian kinerja di tahun 2025 i. Hasil laporan kinerja menjadi dasar penentuan target pada renstra 2025-

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
		menengah TW 3. f. Menyusun Ranwal Renstra yang memuat inovasi yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah selama 5 (lima) tahun g. Menyusun Rancangan LKjIP 2024 yang menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya. h. Mengoptimalkan sosialisasi hasil pengukuran kinerja agar untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian seluruh seluruh unit/satuan kerja. i. Mengoptimalkan sosialisasi informasi dalam laporan kinerja untuk meningkatkan kepedulian				2029 j. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dijadikan dasar perbaikan target pada Renstra 2025-2029 dan Renja 2025

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi / Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Progres		Keterangan
				Sudah	Belum	
		seluruh pegawai. j. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk perbaikan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi.				

BAB 111 AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik kepada pihak yang memberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas. Untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel perlu dilakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang telah dicapai dengan kinerja yang seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara periodik per tribulan dan per tahun. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Capaian kinerja organisasi merupakan capaian sasaran strategis yang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut. Pada capaian kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan capaian strategis untuk kemudian dapat disusun tindak lanjut yang harus dipenuhi untuk melakukan perbaikan ataupun peningkatan. Untuk perbaikan dan peningkatan kinerja berbasis hasil evaluasi dapat dirumuskan solusi yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA/ SASARAN

Pengukuran capaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan/ sasaran serta pelaksanaan kegiatan dan program yang ditetapkan dalam RENSTRA.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

1. Rumus 1:

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut:

Persentase
tingkat
capaian

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Rumus 2:

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut:

Persentase
tingkat
capaian

$$= \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menetapkan analisis pencapaian kinerja, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 beserta petunjuk pelaksanaannya telah menetapkan standart penilaian dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Prosentase	
1.	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2.	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

Pengukuran kinerja berisi capaian/sasaran/kinerja utama/program/kegiatan, indikator kinerja dan pencapaian target masing-masing indikator. Pengukuran kinerja sebagaimana yang telah ditentukan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja dapat dilihat secara rinci sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Pencapaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	Persentase kejadian SARA tertangani	100%	100%	100%	Sangat berhasil
	Persentase konflik sosial tertangani	100%	100%	100%	Sangat berhasil
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politik	Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	80,4	90,34	112,36%	Sangat berhasil
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,99	86,66	101,96%	Sangat berhasil

1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2025

Sesuai Rencana Strategis Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2021- 2026, terdapat 3 (tiga) sasaran. Untuk Sasaran Strategis pertama memiliki 2 (dua) indicator kinerja, sedangkan Sasaran Strategis ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) masing-masing memiliki 1 (satu) indicator kinerja. Berikut adalah analisis capaian kinerja berdasarkan target dan realisasi Tahun 2025:

I. Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat.

I.1 Indikator kinerja yang pertama ini adalah Persentase kejadian SARA tertangani, capaian indikator kinerja utama dapat diukur dengan formulasi:

$$\begin{aligned}\text{Formulasi} &= \frac{\text{Jumlah kejadian SARA tertangani}}{\text{Jumlah kejadian SARA}} \times 100 \% \\ &= \frac{0}{0} \times 100 \% \\ &= 100 \%\end{aligned}$$

Selama tahun 2025 tidak ada kejadian SARA sehingga realisasi yang dicapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 100 %, sehingga capaian kinerjanya 100 % dengan kategori **sangat berhasil**.

Faktor Pendorong Keberhasilan Penanganan kejadian SARA:

- a. Kinerja FKUB Kota Blitar semakin harmonis dalam penataan peningkatan moderasi beragama dengan membangun, memelihara, dan memberdayakan kerukunan antar tokoh umat beragama
- b. Ekistensi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tingkat Kota Blitar dan FPK Tingkat Kecamatan se-Kota Blitar sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan kerjasama antar warga masyarakat dari berbagai latar belakang SARA dalam kerangka NKRI
- c. Eksistensi Forum Dialog antar Pemuka Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan sehingga tercipta sikap saling menghormati dan menghargai antar Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan supaya tumbuh iklim yang kondusif di Kota Blitar
- d. Peran aktif FKUB dalam pembinaan kerukunan antar umat beragama
- e. Peran tokoh-tokoh agama yang selalu memberikan pengertian-pengertian terkait

toleransi dan moderasi beragama serta melakukan dialog antar Pemuka Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan sehingga tercipta sikap saling menghormati dan menghargai antar Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan supaya tumbuh iklim yang kondusif di Kota Blitar

Faktor penghambat penanganan kejadian SARA:

- a. Kurangnya pemahaman nilai-nilai toleransi beragama
- b. Penerimaan yang salah terkait dengan isu-isu toleransi
- c. Kesenjangan sosial mengenai tingkat kesejahteraan antar kelompok SARA
- d. Ketidaksiapan masyarakat menerima perubahan teknologi sosial mendorong renggangnya interaksi sosial antar anggota kelompok Masyarakat
- e. FKUB di tingkat kecamatan-kelurahan kelembagaannya belum optimal, pengurus tidak lengkap karena meninggal dan atau pindah alamat

Rencana tindak lanjut:

- a. Perlu melakukan sosialisasi yang berkelanjutan yang tujuannya mampu mewujudkan sikap toleransi dan kerukunan antar umat beragama
- b. Peran stakeholder dalam memasyarakatkan moderasi beragama
- c. Mengoptimalkan peran FKUB menjaga kerukunan antar umat beragama.
- d. Meningkatkan interaksi antar Pemuka Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan guna menumbuhkan sikap inklusif (terbuka) antar Pemuka Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan yang diharapkan akan diikuti oleh masing-masing anggota komunitas

- e. Mengoptimalkan peran FPK Tingkat Kota Blitar dan FPK Tingkat Kecamatan sebagai wadah komunikasi antar Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan
- f. Penguatan lembaga FKUB tingkat kecamatan-kelurahan dengan melaksanakan reorganisasi kepengurusan, dan pembinaan.

I.2 Indikator kinerja kedua ialah persentase konflik sosial tertangani, capaian indikator kinerja utama dapat diukur dengan:

$$\begin{aligned}
 \text{Formulasi} &= \frac{\text{Jumlah konflik sosial tertangani}}{\text{Jumlah konflik sosial}} \times 100 \% \\
 &= \frac{0}{0} \times 100 \% \\
 &= 100 \%
 \end{aligned}$$

Selama tahun 2025 tidak ada kejadian konflik social sehingga diperoleh hasil perhitungan, realisasi sebesar 100 %, dengan target yang ditetapkan adalah sebesar 100 %. Realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan sehingga didapat capaian kinerja utama yang kedua sebesar 100 %, dengan kategori **sangat berhasil**.

Faktor pendorong keberhasilan penangan konflik sosial:

- a. Melakukan mediasi/rembug kepada masyarakat dalam menangani Konflik social/masyarakat yang terjadi/muncul dan bekerjasama dengan instansi terkait
- b. Patroli gabungan yang dilakukan secara rutin dan berkala untuk mendeteksi penyakit masyarakat (pekat)
- c. Semakin bersinergi dan harmonisnya hubungan antar lembaga (Forkopimda dengan FKDM, Tim Kewaspadaan Dini, dan instansi/instusi terkait lainnya)

Faktor Penghambat penanganan konflik social:

- a. Konflik sosial belum mendapatkan solusi penanganan secara optimal, belum tuntas, menumbuhkan konflik baru, hingga tidak jarang terkesan pembiaran dan berlarut-larut.
- b. Kurang optimalnya upaya deteksi dini potensi konflik
- c. Kurangnya optimalnya peran FKDM dan Tim kewaspadaan Dini dalam mengembangkan upaya deteksi dini potensi konflik dan mengoordinasikannya dengan institusi/instansi terkait

Rencana tindak lanjut:

- a. Secara intens menggali informasi dari masyarakat
- b. Sinergi, harmonisasi pengampu kebijakan / *Stake holder* dalam penanganan konflik;
- c. Optimalisasi peran Timdu Penanganan Konflik Sosial
- d. Sosialisasi, edukasi tentang pentingnya kewaspadaan dini;
- e. Optimalisasi peran media massa
- f. Penguatan kewaspadaan dini Masyarakat
- g. Penguatan peran FKDM tingkat kecamatan/kota dan Tim Kewaspadaan Dini Kecamatan/Kota

II. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politik.

Indikator kinerja dari sasaran kedua adalah persentase ormas dan orpol yang aktif, capaian indikator kinerja utama dapat diukur dengan:

$$\begin{aligned}\text{Formulasi} &= \frac{\text{Jumlah ormas dan Orpol yang aktif}}{\text{Jumlah ormas dan Orpol terdaftar}} \times 100\% \\ &= \frac{159}{176} \times 100\% \\ &= 90,34\%\end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan, diperoleh realisasi kinerja sebesar 90,34 %, dengan target yang ditetapkan adalah sebesar 80,4 %. Tingginya realisasi dibanding target yang telah ditetapkan menyebabkan capaian kinerja utama mencapai 112,36% dengan kategori **sangat berhasil**.

Pada tahun 2025 tercatat jumlah ormas dan orpol terdaftar ada 176 terdiri dari 159 ormas dan 17 Orpol. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Bakesbangpol Kota Blitar diketahui ormas yang aktif sebanyak 142 dan untuk Orpol yang aktif di Kota Blitar sebanyak 17. Jumlah total Ormas dan Orpol aktif 159 (terlampir).

Faktor Pendorong:

- a. Pemantauan/cross chek dilapangan secara rutin dan berkala yang dilakukan oleh bidang Poldagri terkait keberadaan, kegiatan dan keaktifan Ormas dan Orpol
- b. Adanya kegiatan Bakesbangpol yang melibatkan Ormas dan Orpol.
- c. Data ormas dan orpol yang ter update
- d. Koordinasi melalui grup WA maupun secara tatap muka

Faktor penghambat:

- a. Belum adanya kewajiban ormas dan orpol mencatatkan diri ke Bakesbangpol
- b. Masih banyak ormas yang enggan untuk melaporkan kegiatan, keaktifannya/keberadaannya
- d. Ormas yang sudah ada tetapi tidak aktif tidak bisa dihapus atau dihilangkan
- e. Belum terbentuknya Tim terpadu pengawasan ormas
- f. Orpol yang tidak memiliki keterwakilan di DPRD menjadi Orpol yang mati suri
- g. Tidak adanya dana bantuan untuk ormas sehingga ormas enggan melaporkan kegiatannya

Rencana tindak lanjut:

- a. Sosialisasi penggunaan aplikasi e-landa untuk Ormas dan Orpol guna secara rutin dan berkala melaporkan kegiatannya dan perubahan yang terjadi dalam struktur organisanya termasuk perpindahan kantor sekretariat/keberadaannya.
- b. Dibentuk Tim Terpadu Pengawasan Ormas
- c. Diadakan kegiatan yang melibatkan Orpol yang ada di Kota Blitar

III. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Indikator kinerja dari sasaran ke dua ini adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Tahun 2025 nilai SAKIP Bakesbangpol mengalami kenaikan menjadi 86,66 dari nilai 86,12, pada tahun 2024.

Faktor Pendorong:

Berdasarkan hasil dari implementasi SAKIP untuk komponen pelaporan kinerja mendapatkan nilai paling tinggi yaitu sebesar 98,21% hal ini di dukung oleh:

- a. Terdapatnya dokumen laporan yang menggambarkan kinerja
- b. Dokumen laporan kinerja telah memenuhi standart, menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta Upaya perbaikan/penyempurnaannya
- c. Pelaporan kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Faktor Penghambat indikator kinerja ini adalah:

Berdasarkan hasil dari implementasi SAKIP untuk komponen perencanaan kinerja mendapatkan nilai paling rendah yaitu sebesar 0,90 % hal ini di sebabkan oleh:

- a. Target yang ditetapkan dalam perenacanaan terlalu rendah karena tidak di ubah saat ada P-APBD

- b. Dokumen perencanaan belum menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antar kondisi/hasil yang akan dicapai
- c. Dokumen Renstra belum digunakan sepenuhnya untuk acuan penyusunan dokumen Renja
- d. Target jangka menengah dalam Renstra belum dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan
- e. Anggaran yang ditetapkan belum mengacu pada kinerja yang ingin dicapai
- f. Setiap pegawai belum memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
- g. Dokumen Renstra belum direviu secara berkala.

Rencana tindak lanjut:

- a. Mereview penetapan target kinerja dengan memanfaatkan capaian tahun sebelumnya maupun sumber data lain yang relevan.
- b. Mengoptimalkan aplikasi e-landa untuk mengumpulkan data kinerja agar data terdokumentasi dengan baik.
- c. Melakukan pembahasan bersama-sama seluruh perangkat unit organisasi dalam pengyukuran kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mengetahui dan menganalisa permasalahan/hambatandalam mencapai target kinerja, sehingga menghasilkan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan dalam menentukan strategi dan pengambilan keputusan untuk menjaga agar target kinerja dapat tercapai.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan capaian pada LKJiP agar digunakan dalam penentuan strategi maupun penentuan target kinerja pada dokumen perencanaan selanjutnya.

2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2023 - 2025

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja
Tahun 2023, 2024 dengan Tahun 2025

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	Persentase Kejadian SARA Tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Konflik Sosial Tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politik	Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	80,2%	87,05%	80,3%	89,53%	80,4%	90,34%
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,97)	A (85,62)	A (84,98)	A (86,12)	A (84,99)	A (86,66)

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa:

a. Sasaran I

- Indikator kinerja pertama, jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dan 2024 tidak mengalami perubahan yaitu tahun 2025 tetap dimana realisasi 100 % sesuai dengan target yang ditetapkan 100 %. Hal ini di dorong oleh peran FKUB, FPK dan Lembaga terkait yang secara aktif melakukan koordinasi dan dialog antar pemuka agama sehingga tidak ada kejadian SARA.
- Indikator kinerja kedua, jika dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dan 2024, pada tahun 2025 tidak mengalami perubahan yaitu tetap dimana realisasi 100 % sesuai dengan target yang ditetapkan 100 %. Hal ini di dorong oleh peran aktif FKDM dalam melaksanakan koordinasi dengan lambaga terkait guna meningkatkan kewaspadaan dini untuk mencegah munculnya potensi konflik.

b. Sasaran II

Indikator kinerja ketiga, untuk tahun 2023, 2024 dan 2025 semua melampaui target yang di tetapkan, hal ini di

sebabkan adanya monev ormas dan orpol ke lapangan dan up date data. Pada tahun 2025 ada 159 ormas terdaftar dan ada 142 ormas yang terpantau aktif, sedangkan untuk parpol masih dengan jumlah yang tetap yaitu 17 orpol terdaftar di Bakesbangpol dan aktif. Realisasi ormas dan orpol aktif mencapai 90,34%, di atas target yang ditetapkan sebesar 80,4%.

c. Sasaran III

Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah, dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 terus mengalami kenaikan nilai SAKIP, dimana pada tahun 2023 sebesar 85,62; pada tahun 2024 menjadi 86,12 dan pada tahun 2025 naik menjadi 86,66. Hal ini didorong oleh terpenuhinya komponen pelaporan kinerja, dimana dalam penilaian SAKIP komponen ini mendapat nilai tertinggi yaitu 98,21%.

Capaian sasaran I dan II ini mendukung Misi 1: **“Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan”**

serta pencapaian target Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dimana tahun 2023 nilai IKUB 85,15, pada tahun 2024 mendapat nilai indeks 85,49.

Faktor Pendorong tercapainya nilai IKUB di atas target adalah tingginya nilai komponen Indeks Kesetaraan di Blitar yang mencapai 89,05. Angka ini mencerminkan komitmen bersama untuk memastikan setiap individu diperlakukan dengan adil dan setara tanpa memandang agama. Kesetaraan ini memungkinkan semua umat beragama, baik mayoritas maupun minoritas, untuk memperoleh hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan beribadah. Dengan adanya kesetaraan ini, potensi diskriminasi dan ketidakadilan dapat diminimalkan, sehingga tercipta rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga kota.

Sedangkan untuk capaian nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 83,75 dan dilakukan penghitungan pada tahun 2025 dan mendapatkan nilai 88,68.

Faktor Pendorong:

Tercapainya nilai IDI di atas target dipengaruhi oleh tingginya nilai dari 3 indikator, yaitu:

1. Indikator ke 6 (enam):

Pemenuhan Terhadap Hak-Hak Pekerja yaitu hak-hak pekerja semakin terjamin seperti kesehatan, keselamatan kerja dan kematian.

2. Indikator ke 8 (delapan):

Kesetaraan Gender yaitu semakin aktifnya peran perempuan dalam bidang ekonomi dan politik sehingga menguatkan demokrasi Indonesia dan semakin berkurangnya diskriminasi berbasis gender.

3. Indikator ke 21 (dua puluh satu):

Kinerja Birokrasi dalam Pelayanan Publik

Kota Blitar berhasil meraih nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) 4,52 kategori A dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sehingga menunjukkan pelayanan prima dari Pemerintah Kota Blitar.

3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN AKHIR PERIODE RENSTRA

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RENSTRA	Kinerja Tahun 2025		Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi	
1	2	4	5	6	7
Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	Persentase kejadian SARA tertangani	100 %	100%	100%	100%
	Persentase konflik sosial tertangani	100 %	100%	100%	100%
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politik	Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	80,5%	80,4%	90,34 %	112,22%
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (85)	A (84,99)	A (86,66)	101,95%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa untuk Sasaran I:

Indicator kinerja pertama dan kedua yaitu persentase kejadian SARA tertangani dan persentase konflik sosial tertangani, setiap tahun targetnya sama yaitu 100%. Capaian realisasi kinerja tahun 2025 terhadap target akhir renstra 2021-2026 sebesar 100% dengan tingkat kemajuan juga 100%.

Sasaran II:

Untuk indicator kinerja sasaran II realisasi sudah melebihi target tahun 2025 dan target akhir periode RENSTRA dengan tingkat kemajuan 112,22%.

Sasaran III:

Indicator kinerja sasaran III yaitu Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah realisasinya untuk tahun 2025 sebesar

86,66 sudah berada di atas target akhir renstra 2021-2025 yaitu 85, dengan tingkat kemajuan 101,95%.

4. PERBANDINGAN REASLISASI KINERJA DENGAN REALISASI NASIONAL (TARGET SPM)

Bakesbangpol tidak mengampu urusan pelayanan dasar sehingga tidak menyajikan pengukuran SPM.

Disini akan di bandingkan dengan realisasi kinerja dari Bakesbangpol Kabupaten Malang. Berikut perbandingan realisasi kinerja Bakesbangpol Kota Blitar dengan Bakesbangpol kabupaten Blitar:

Tabel 3.4
Perbandingan Reaslisasi Kinerja Sasaran
Bakesbangpol Kota Blitar dengan
Bakesbangpol Kabupaten Malang

KOTA BLITAR				KABUPATEN BLITAR			
Uraian Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Uraian Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	Persentase kejadian SARA tertangani	100%	100%	Meningkatkan fasilitasi penanganan konflik ipoleksosbud dan keagamaan	Persentase peningkatan fasilitasi penanganan konflik ipoleksosbud dan keagamaan	100%	100%
	Persentase konflik sosial tertangani	100%	100%	Meningkatnya Penanganan Kasus Konflik Sosial	Persentase Penanganan Kasus Konflik Sosial	100%	100%
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politik	Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	80,4%	90,34%				
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,98)	A (86,66)	Meningkatnya akuntabilitas pada Bakesbangpol Kab. Blitar	Nilai SAKIP pada Bakesbangpol Kab.Blitar	81	81,94

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Keberhasilan capaian Indicator kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan, tidak terlepas dari dukungan dana untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang mendukung tercapainya Sasaran Strategis Bakesbangpol Kota Blitar. Tabel di bawah ini menyajikan data belanja operasional dan modal Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2025.

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Belanja

No.	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian
1.	Belanja Operasional dan modal	8.267.140.832,00	7.507.161.428,00	90,81
	Jumlah	8.267.140.832,00	7.507.161.428,00	90,81

Rincian untuk realisasi anggaran belanja langsung seperti tabel di bawah ini:

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran untuk Setiap Sasaran dan Program Tahun 2025

NO	Sasaran/Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat			
1	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.279.184.300,00	1.178.370.602,00	92,12
2	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	177.003.100,00	148.600.200,00	83,95
3	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	1.536.811.200,00	1.494.160.982,00	97,22
II	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politik			
4	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	661.920.108,00	659.545.708,00	99,64

5	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	28.448.240,00	26.529.200,00	93,25
III	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah			
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.583.773.884,00	3.999.954.736,00	87,26

1. Alokasi Per-Sasaran Pembangunan

Tabel 3.7
Alokasi Per-Sasaran Pembangunan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
1	2	3	4
Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	Persentase kejadian SARA tertangani	2.992.998.600,00	36,20
	Persentase konflik sosial tertangani		
Meningkatnya partisipasi masyrakat dalam menggunakan hak politik	Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	690.368.348,00	8,35
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	4.583.773.884,00	55,45
JUMLAH		8.267.140.832,00	100,00

Total alokasi anggaran Bakesbangpol pada tahun 2025 sebesar **Rp. 8.267.140.832,00** terbagi dalam 4 (empat) indicator kinerja sasaran. Untuk indicator kinerja Persentase kejadian SARA tertangani dan Persentase konflik sosial memperoleh anggaran sebesar Rp. 2.992.998.600,00 atau 36,20%, yang merupakan gabungan dari 3 (tiga) program dan terdapat hibah FKUB, FPK, BNK, TNI dan POLRI.

Untuk indicator kinerja Persentase Ormas dan Orpol yang aktif memperoleh anggaran sebesar Rp. 690.368.348,00 atau 8,35%, merupakan gabunga dua program dan

didalamnya terdapat dana hibah untuk 7 (tujuh) parpol. Untuk secretariat mendapat anggaran sebesar yaitu Rp. 4.583.773.884,00 atau 55,45% yang merupakan belanja rutin.

2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Tabel 3.8
Pencapaian Kinerja dan Anggaran per Sasaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			PROGRAM	ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN		ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	Persentase kejadian SARA tertangani	100%	100%	100%	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.456.187.400,00	1.326.970.802,00	91,13
						Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya			
		Persentase konflik sosial tertangani	100%	100%	100%	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1.536.811.200,00	1.494.160.982,00	97,22
	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politik	Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	80,4%	90,34%	112,36	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	690.368.348,00	686.074.908,00	99,38
						Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			

2	Menin gkatny a Kinerja Perang kat Daera h	Nilai SAKIP Perang kat Daera h	A (84,99)	A (86,66)	101,96	Program Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	4.583.773.884,00	3.999.954.736,00	87,26
---	--	---	--------------	--------------	--------	---	------------------	------------------	-------

3. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.9
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	Persentase kejadian SARA tertangani	100	94,26	1,06
	Persentase konflik sosial tertangani			
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politik	Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	112,36	99,38	1,13
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	101,96	87,26	1,17

Keterangan:

Efisiensi diperoleh dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan capaian keuangan

1 ≥ = **efisien**

1 < = **tidak efisien**

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2025 terjadi efisiensi anggaran. Faktor yang mempengaruhi nilai efisiensi pelaksanaan anggaran tersebut adalah persentase realisasi capaian sasaran dan persentase realisasi anggaran. Realisasi capaian sasaran yang tinggi dan realisasi anggaran yang rendah akan diperoleh pelaksanaan anggaran yang efisien. Untuk ke 4 (empat) indikator kinerja dari 3 (tiga) sasaran semuanya efisien hal

ini ditunjukkan dengan nilai efisiensi yang diperoleh lebih dari 1 (satu).

Pada indikator kinerja Persentase kejadian SARA tertangani dan Persentase konflik sosial tertangani, tingkat efisiensi tercatat efisien hal ini disebabkan potensi kejadian SARA dan konflik sosial selama tahun 2025 bisa ditangani.

Untuk sasaran ke 2 (dua) dengan indikator kinerja Persentase Ormas dan Orpol yang aktif tingkat efisiensi juga tercatat efisien hal ini disebabkan jumlah ormas dan orpol yang melaporkan keaktifannya sudah lebih banyak dibanding tahun-tahun sebelumnya dan melebihi target.

Pada sasaran ketiga dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah juga tercatat efisiensi hal ini didorong oleh tingginya nilai capaian pada komponen pelaporan kinerja yaitu sebesar 98,21%, nilai inilah yang dapat mendorong capaian nilai SAKIP di atas target yang ditetapkan dari target 84,99 diperoleh nilai 86,66.

C. PRESTASI/PENGHARGAAN

Pada tahun 2025 Bakesbangpol Kota Blitar telah memperoleh:

1. Peringkat 6 (enam) dengan nilai A, Penghargaan SAKIP Tingkat Kota Blitar
2. Juara 2 Legal Drafting Award 2025
3. Juara 3 Inovasi Government Award

A. KESIMPULAN

Dari analisis hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja dapat disimpulkan bahwa secara umum Bakesbangpol Kota Blitar pada Tahun 2025 mampu merealisasikan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan rata-rata sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari realisasi capaian empat indikator kinerja sasaran Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2025 sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Berikut uraian target dan realisasi capaian kinerja untuk setiap sasaran:

1. Sasaran I

Meningkatnya komunikasi dan silaturahmi antar umat beragama

a. Indikator Kinerja: Persentase kejadian SARA tertangani

Target : 100 %
Realisasi : 100 %
Capaian kinerja : 100 %

Selama tahun 2025 tidak ada kejadian SARA sehingga indikator kinerja ini masuk kategori sangat berhasil.

b. Indikator sasaran: Persentase Konflik Sosial tertangani

Target : 100 %
Realisasi : 100 %
Capaian kinerja : 100 %

Selama tahun 2025 tidak ada kejadian konflik sosial sehingga indikator kinerja ini masuk kategori sangat berhasil.

2. Sasaran II

Indikator sasaran: Persentase Ormas dan Orpol yang aktif

Target : 80,4 %
Realisasi : 90,34 %
Capaian kinerja : 112,36 %

Pada tahun 2025 tercatat ormas dan orpol yang aktif sebesar 90,34% sudah di atas target dengan capaian kinerja yaitu 112,36%, angka ini sudah menunjukkan indicator kinerja sangat berhasil

3. Sasaran III

Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah dimana nilai SAKIP Bakesbangpol mengalami kenaikan dibanding tahun 2024. Target nilai SAKIP tahun 2025 sebesar 84,99 realisasi 86,66 Nilai realisasi ini menunjukkan indicator kinerja sasaran ke 3 (tiga) sangat berhasil.

Hasil dari analisis pengukuran kinerja ini dapat digunakan sebagai pijakan penentuan kebijakan berikutnya untuk tetap konsisten dalam pewujudan **Good Governance**.

B. LANGKAH PERBAIKAN

Langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan oleh Bakesbangpol Kota Blitar berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Rencana Tindak Lanjut LKjIP
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar
Tahun 2025

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi/Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
1	a. SK Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) belum ada persetujuan dari Walikota b. Perwali Pedoman Pendidikan Pancasila	a. Pengajuan kembali draft SK FPK b. Pengajuan kembali Perwali PPWK	- Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan - Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	a. Terbit SK FPK b. Terbit Perwali PPWK	√	√	√

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi/Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
	dan Wawasan Kebangsaan (PPWK) belum disetujui oleh Walikota c. Belum adanya pengukuran Indeks Harmoni Indonesia secara mandiri	c. Mengukur IHAI secara mandiri		c. Terukurnya IHAI			√
2	a. kurangnya kewaspadaa n dini	a. peningkatan kewaspadaan dini masyarakat;	- Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	a. Rakor kewaspdaan dini dan penanganan konflik	√	√	√

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi/Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
	masyarakat terhadap potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang berkembang di masyarakat. b. Kurangnya ruang dialog bagi masyarakat yang terdampak konflik	b. membangun budaya dialog, pluralisme	- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial - Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	b. Terlaksananya dialog Forkopimda dengan masyarakat			

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi/Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
3	Optimalisasi pemenuhan hak-hak politik	Kesetaraan gender dalam politik dengan pemberian pendidikan politik bagi perempuan dan disabilitas	- Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik - Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Pendidikan politik dengan peserta Perempuan dan disabilitas	√	√	√

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi/Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
4	Kurangnya kesadaran Ormas melaporkan keberadaanya	a. Sosialisasi aplikasi e-landa b. Sosialisasi Pembentukan Tim Terpadu Pengawasan Ormas	- Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan - Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	a. Kenaikan jumlah Ormas yang mengisi aplikasi e-landa untuk melaporkan keaktifannya b. Sosialisasi SK Tim Terpadu Pengawasan Ormas dengan anggota terdiri dari instansi vertikal (Polres, Kodim, BIN, Kejaksaan, Imigrasi)	√	√	√
5	Tidak ada permasalahan	Menjalan giat rutin dengan lebih baik lagi	- Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya - Keegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya - Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan	Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal	√	√	√

No	Permasalahan/ Kendala yang dihadapi	Strategi/Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Ukuran Keberhasilan	Timeline		
					Tahun 2026 (murni)	Tahun 2026 (perubahan)	Tahun 2027
			Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				

Demikian beberapa hal yang dapat disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bakesbangpol Kota Blitar Tahun 2025, semoga dapat memberikan informasi yang jelas akan capaian kinerja Bakesbangpol Kota Blitar. Mengingat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) akan dipergunakan secara terus menerus dan saling terkait dalam system informasi dan system manajemen instansi pemerintah, maka diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun oleh Bakesbangpol Kota Blitar akan mendapat masukan positif dan konstruktif dari berbagai pihak yang terkait sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan keberkahan dan kasih sayang-Nya sehingga kita memiliki kekuatan dan kemampuan untuk bersama-sama membangun Kota Blitar dengan tulus ikhlas dalam rangka mewujudkan visi dan misi daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

Blitar, 5 Februari 2026

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Blitar



TOTO ROBANDIYO, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 196612041996031004

Lampiran I LKjIP

**MATRIK RENCANA STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BLITAR
TAHUN 2021-2026**

Visi : Kota Blitar KEREN, Unggul, Makmur, Bermartabat
Misi : Meningkatkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan

TUJUAN					SASARAN					CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
Uraian	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi Awal 2020	Target 2025	Uraian	Indikator	Formulasi Perhitungan	Kondisi Awal 2020	Target 2025	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
Meningkatnya kehidupan masyarakat yang kodusif, demokratis serta berwawasan kebangsaan	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) pada tahun bersangkutan	84,38	84,93	1.	Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	Persentase Kejadian SARA Tertangani ----- x 100% Jumlah Kejadian SARA	100%	100%	Meningkatkan upaya preventif dengan melakukan musyawarah bersama semua aliran agama	Peran aktif Forum Kerukunan Umat Bergama (FKUB) berkoordinasi dengan TOGA TOMAS	
							Persentase Konflik Sosial Tertangani ----- x 100% Jumlah Konflik Sosial	100%	100%	Menjalankan system respon dini yaitu merespon suatu konflik dengan cepat tanggap	Peran aktif FKDM Kota dan Kecamatan serta bekerja sama dengan instansi terkait	
					2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politik	Persentase Ormas dan Orpol yang aktif ----- x 100% Jumlah Ormas dan Orpol terdaftar	NA	80,4%	Penerapan aplikasi untuk ormas dan orpol	Penyempurnaan data Ormas dan orpol aktif di Kota Blitar	
Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah pada tahun bersangkutan	A (82,94)	A (84,99)	3.	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Penilaian atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah oleh Inspektorat Daerah pada tahun bersangkutan	82,94	84,99	Peningkatan implementasi akuntabilitas kinerja pada perangkat daerah	Penyempurnaan penyusunan dan penerapan dokumen akuntabilitas kinerja perangkat daerah	

Blitar, 2 Januari 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik


 Kota Blitar
TOTO ROBANDIYO, S.Sos., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196612041996031004

Lampiran II LKJIP

RENCANA KINERJA TAHUNAN (PERUBAHAN)									
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BLITAR									
TAHUN 2025									
SASARAN			PROGRAM			KEGIATAN/SUB KEGIATAN			
URAIAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	URAIAN	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	URAIAN/ KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	Persentase kejadian SARA tertangani	100%	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase penyelesaian konflik keagamaan	100%	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	84%	1.279.184.300
						Jumlah pembentukan kampung berkarakter Pancasila		3 kampung	
						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	150 orang	62.685.300
						Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	3 laporan	250.000.000
				Persentase kampung berkarakter Pancasila	14,3%	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	300 keluarga	83.250.500
						Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	1 dokumen	267.225.000
						Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	78 orang	595.813.500
						Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 dokumen	200.000
						Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	1 dokumen	2.650.000
						Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	78 orang	17.360.000

			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase masyarakat yang mendapatkan peningkatan kompetensi pembinaan sosial	79%	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Persentase masyarakat yang mengikuti sosialisasi	93%	177.003.100
						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200 orang	27.003.100
						Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 laporan	150.000.000
	Persentase Konflik Sosial Tertangani	100%	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase potensi Konflik Sosial yang terselesaikan	100%	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan	Persentase potensi konflik sosial yang ditindaklanjuti	100%	1.536.811.200
						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	6510 orang	489.263.500
						Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	3 laporan	990.000.000
						Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	57.547.700
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politik	Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	80,4%	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partai politik yang aktif dalam pendidikan politik masyarakat	100%	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase pemahaman masyarakat yang mengikuti pendidikan politik	84%	661.920.108

						Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	200 orang	12.190.000			
						Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	300 orang	30.338.400			
						Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	8 dokumen	619.391.708			
						Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	75%	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Organisasi Masyarakat Yang aktif	121 ormas	28.448.240
									Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	250 orang	28.448.240
						Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84,99)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat	88,8	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar		100%	5.494.800				
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 dokumen	2.520.600			
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 laporan	2.974.200			

					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	3.601.244.893
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 orang	3.600.357.493
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	5 laporan	887.400
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	70.428.375
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	4 paket	19.678.800
					Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	22 Orang	50.749.575
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	207.160.500
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	11.872.500
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	27.550.200
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	8.117.000
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	29.355.000
					Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	8.424.800
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	7.800.000
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	40 Laporan	110.825.000
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	3.216.000
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100%	96.704.200
					Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 unit	40.000.000
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit	11.052.200
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	8.912.000

					Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit	36.740.000
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai :	100%	259.600.416
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	44.511.216
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	215.089.200
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	343.140.700
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit	75.703.200
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	8 Unit	6.324.000
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	30.796.000
					Pemeliharaan aset tak berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit	25.000.000
					Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	205.317.500
					TOTAL			8.267.140.832

Blitar, 20 Oktober 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Blitar



TOTO ROBANDIYO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612041996031004

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BLITAR**

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **TOTO ROBANDIYO S.Sos., M.SI**
Jabatan : **Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I.**
Jabatan : **Walikota Blitar**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

SYAUQUL MUHIBBIN, S.H.I.

TOTO ROBANDIYO S.Sos., M.SI
IV/c / Pembina Utama Muda
NIP. 196612041996031004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BLITAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kerukunan hidup bermasyarakat	Persentase Kejadian SARA Tertangani	100.00(%)
		Persentase Konflik Sosial Tertangani	100.00(%)
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politik	Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	80.40(%)
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84.99(Nilai)

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1,401,076,400.00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Bagi Hasil
2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	179,403,100.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	28,224,200.00	Pendapatan Bagi Hasil
4	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	663,041,108.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
5	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1,255,413,500.00	Dana Alokasi Umum (DAU)
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,451,937,524.00	Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Bagi Hasil
Total:		7,979,095,832.00	

Walikota Blitar,

SYAIFUL MUHIBBIN, S.H.I.

Blitar, 28 Oktober 2025
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Blitar,

TOTO ROBANDIYO, S.Sos., M.Si
IV/c- Pembina Utama Muda
NIP. 196612041996031004

Lampiran IV LKjIP

PENGUKURAN KINERJA KEPALA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BLITAR

Perangkat Daerah/Unit Kerja : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar
Tahun : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	TAHUN 2025		KET	PROGRAM	PAGU Rp.	TAHUN 2025		KET
					REALISASI	%				REALISASI	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya Komunikasi dan Silaturahmi Antar Umat Beragama	Persentase kejadian SARA tertangani	Jumlah kejadian SARA tertangani / Jumlah kejadian SARA x 100 %	100%	100%	100%		Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.279.184.300,00	1.178.370.602,00	92,12	
								Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	177.003.100,00	148.600.200,00	83,95	
		Persentase konflik sosial tertangani	Jumlah konflik sosial tertangani / Jumlah konflik sosial x 100 %	100%	100%	100%		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	1.536.811.200,00	1.494.160.982,00	97,22	
		Persentase Ormas dan Orpol yang aktif	Jumlah Ormas dan Orpol yang aktif / Jumlah Ormas dan Orpol terdaftar x 100 %	80,4%	90,34%	112,36%		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	661.920.108,00	659.545.708,00	99,64	
								Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	28.448.240,00	26.529.200,00	93,25	
2	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Hasil Nilai Sakp PD	A (84,99)	A (86,66)	101,96%		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.583.773.884,00	3.999.954.736,00	87,26	

Blitar, 2 Januari 2026
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Blitar


TOTO ROBANDIYO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196612041996031004

Lampiran V LKjIP

DATA ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS) KOTA BLITAR
TAHUN 2025

NO	NAMA ORGANISASI	SUSUNAN PENGURUS			PERIODE	ALAMAT/TELP.		JUMLAH ANGGOTA	JENIS ORGANISASI	KETERANGAN BADAN HUKUM
		KETUA	SEKRETARIS	BENDAHARA						
1	ASOSIASI PEDAGANG KAKI LIMA INDONESIA (APKLI)	SUGENG WIDODO, SPD.	Turyana Ramlan	Robiyah	2021-2025	Jl. Maninjau E.1 No. 10 Tanjungsari	085606129252	25 orang	profesi	AHU-63.AH.01.01.Tahun 2013
2	Asosiasi Petugas Rekrut Tenaga Kerja Indonesia Kota Blitar (ASPERTI)	HARYONO				Jl. Seruni No. 15 Kota Blitar	082113539999	18 orang	profesi	
3	ASPERTANAS	HANDOKO PRAMONO, SE				Jl. Merapi No. 5 Blitar	082111000458	15 orang	profesi	
4	BADAN MUSYAWARAH ANTAR GEREJA (BAMAG) KOTA BLITAR	PDM.STEFANUS EDY	PDT.Gersom Suncoko	PS.Heri Prasetyo	2023-2028	Puri Mawar No.21, Jl. Mawar Hai Mart masuk ke dalam	08123295792	6000 orang	keagamaan	AHU-0008094.AH.01.07.TAHUN 2023
5	Becak Wisata Makam Bung Kamo	MARYONO				Jl. Dr. Cipto No. 3 (PIPP) Blitar		80 orang	profesi	
6	Bhayangkari Cabang Blitar	DESNA YUDHO	Ririn Nanang	Eni Rofik		Jl. Sudirman No. 32 Blitar		250 orang	wanita	
7	Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) Cab. Blitar	DR. AZHAR ANWAR, MM, MMRS	Abdul Sukron	Wahyu Nurida Sari	2022 - 2026	Jln Cemara No.249 Blitar		200 orang	Isi	
8	Dewan Harian Cabang Angkatan (DHC) 45 Blitar	TUGIYANTO SAPARI	Suwaji			EX.SMPN 5 Kota Blitar	085731944515 , 081572787528 , 082141807980	60 orang	profesi	
9	Dewan Kesenian Kota Blitar (DKKB)	TATAG TRIYONO	Eka Sulistyana	Inggit Isrupiati	2021-2025	Jl.Ir. Soekamo Blitar	082231364453	45 orang	kesamaan scr umum	
10	Dharma Pertiwi Cabang Blitar					Jl. A. Yani No. 6 Blitar		25 orang	wanita	
11	Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kota Blitar	RETNO AMBARJANI PRIYO SUHARTONO	Betty Mitatyashari	Supri Hari Astuti		Jl. Sudanco Supriyadi No. 22 Blitar	Telp. 814955	250 orang	wanita	AHU.-0002906.AH.01.05.TAHUN 2025
12	DPC GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) Blitar	VITA NERIZZA PERMAI	Arif Maulana Ashari	M. Ulin Nuha	2024 - 2026	Jl. Dr.Sutomo Gang II C No. 3 Sananwetan	082257919497	500 orang	kesamaan scr umum	

13	DPC LVRI Blitar	MUGENI ALAZIZ MAYOR INF PURN	Marsidi	Amrun	2022 - 2027	EX.SMPN 5 Kota Blitar	081233224678	162 orang	profesi	
14	DPC Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI)	BAMBANG SUNARSO				Jl Ikan Gurami : 2 Perum Griya Kalimas Indah Pakunden Blitar		20 orang	profesi	
15	DPC PROJO (PRO JOKOWI)	FERRY YUSWANTO	belum ketemu			JL. TGP No 1 Blitar		100 orang	ormas	
16	DPC. Gapensi	JODIONO				Jl. Ngegong Gedog Blitar	Tlp.803225 , 081394091116	15 orang	profesi	
17	DPC. Pemuda Pancasila	SUKARSO DWI ATMOJO	Eka Sulistyana	Radian Adi Ismaya	2023-2027	BTN Asabri BLOK H-9	82257017048	25 orang	Isi	
18	DPD AMPI Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia Kota Blitar							25 orang	kesamaan scr umum	AHU. 0009810.AH.01.07.TAHUN 2018
19	DPD KNPI Komite Nasional Pemuda Indonesia	KHULUKUL JUMMI YANUARDANA	Syarifudin Ahmad	Ardan Abadan Malik	2023 - 2026	Selatan Kantor Kecamatan Sananwetan Kota Blitar	085851414237	34 orang	kesamaan scr umum	AHU-0000037.AH.01.08.TAHUN 2019
20	DPD Pemuda Panca Marga (PPM)	ARIS WIJAYA	Rini Andriani	Sriatin	2022-2027	Jl. Tanjung No. 1	085784180865	19 orang	kesamaan scr umum	AHU-0001282.01.08.TAHUN 2020
21	DPD Perjuangan Walisongo Indonesia Laskar Sabilillah (PWI)	MUCHAMMAD MUSTAFID	Alim Sulaiman	H.Suhandoko	2025 - 2032	Jl. Cisdane 45 Bendo Kepanjenkidul	081555694422	92 Orang	Organisasi Kemasyarakatan	AHU-0001065-AH.01.08.TAHUN 2024
22	DPD PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA	SRI WINARNI	Tutus Fibri Ajimas Budi	Shulthonah	2022 - 2027	JL. Kalimantan Karangtengah Kota Blitar	08123398272	38 orang	profesi	Mengikuti DPP (Dewan Pengurus Pusat)
23	FATAYAT NU KOTA BLITAR	AISYATUL AZIZAH, M.H.	Niswatul Khasanah	Tatik Jamatus S, S.Pd.Aud	2024 - 2029	JL. MASJID 24,	085755161649	250 orang	agama	AHU dari pusat
24	FKKPBM/BARET MERAH	AGUS HARI MURTONO	Adi Wijaya	Ahmat Fredy Susilo	2020-2024	Jl. Raras Wuyung No. 65 Kota Blitar	085815428730	25 orang	keagamaan	AHU-0000928.AH.01.08 Tahun 2020
25	FKPPI	IR JOKO TRISNO MUDIYZANTO, SH	Drs. H. Setiawan Adi S, M.Pd	Wahyu Diarti	2023 - 2028	Jl. Srigading Gang 2 No. 4 Kepanjenkidul	081334499867	70 orang	profesi	AHU.0000897.AH.01.08 TAHUN 2022
26	FORHATI / ALUMNI HMI WATI	DRA. BADRIYAH	Nurhasanah, S.Pd	Rini Diyah E, S.P	2021-2026	Jl. Bintang No. 20 Blitar	08113667200	14 orang	kesamaan scr umum	AHU.0001626.AH.01.07. TAHUN 2022
27	FORMAK	TRI SASONGKO				Masih nunggu		30 orang	Isi	SKT NO : 1535-00- 00/262/XII/2020
28	Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FKBM)					Jl. Ciliwung Nomor : 304 – Blitar	0342815120	35 orang	Isi	
29	Front Mahasiswa Revolusioner								Isi	
30	Gab. Organisasi Penyelenggara TK Indonesia (GOPTKI) Kota Blitar	IBU.RETNO AMBARYANI PRIYO S	Masih reorganisasi			Jl. S. Supriyadi Nomor : 22 Blitar		25 orang	profesi	AHU mengikuti pusat

31	Gabungan Organisasi Wanita (GOW)	KHARISA RIZQI UMAMI MUHIBBIN,S.Pd	Cuplik	Dian Rahma	2025-2028	Jl S. Supriyadi Nomor : 18 – Blitar	0342801422	100 orang	wanita	
32	Generasi Muda “ KOSGORO ” Cabang Kota Blitar	-	-	-	-	-	-	-	Isi	
33	Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT)	HERY				Jl. Cokroaminoto Gang Masjid Blitar		25 orang	Isi	
34	Gerakan Pemuda Ansor (GP- ANSHOR) Kota Blitar	M. ROMDONI	Khazin Asrori	Muhaimin Sanjaya	2025-2029	Jl. Cisadane	'085749550904	136 orang	keagamaan	
35	GOLDEN SILAT							40 orang	Isi	
36	HIMPUNAN INSAN PECINTA BUNG KARNO (HIP-BK)							5 orang	komunitas	
37	HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (HMI) KOTA BLITAR	QITHFIRUL AZIZ	A'yun Latufah Hanum	Lucky Aprilia	2025-2026	Jl Sumba gg2 karangtengah		200 orang	keagamaan	AHU ikut HMI Pusat
38	Himpunan Paudi kota Blitar	SRI WINARSIH, S.Pd	Tiutus Ftri	Shulthonah	2022-2027	Jl. Kalimantan Karangtengah Kota Blitar		25 orang	profesi	
39	Himpunan Pedagang di Makam Bung Karno (HIPEMAB)							60 orang	profesi	
40	Himpunan Putra Putri Keluarga Angkatan Darat (HIPAKAD)	SOEGENG JOENIANTO, ST	Tugas Nanggolo Yudo	Sri Yudha Ningsih	2024 - 2029	Jl. A.Yani RT/RW 01/VI	081230169285	14 orang	kesamaan scr umum	
41	IKATAN ALUMNI RESIMEN MAHASISWA INDONESIA / IARMI	SUGENG ISNAWANTO, MPD				Jl.Mojopahit No. 5		25 orang	kesamaan scr umum	AHU-0009241.AH.01.07.TAHUN 2020
42	Ikatan Bidan Indonesia	NURYATI S.ST.Bd	Andika Wulandari S.ST	Anik Hidayatus	2023-2028	RS SHUHADA HAJI	8123363782	200 orang	profesi	
43	Ikatan Dai Indonesia (IKADI)	SUKARYONO	Taufiq rohman	Sudaryono	2022 - 2027	Jl. Enggano Kel.Sananwetan	7721824 /08564586660	125 orang	keagamaan	AHU-00101.60.10.2014
44	IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH	SUKARSO	Fadhil Naura Nurhadi	Niswatul Lutfiana	2023 - 2024	Jl. Cokroaminoto Kota Blitar	081243458659	10 orang	keagamaan	
45	IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA (IPNU)	ACHMAD HAFY AKMAL MOESLIM	Muhammad Risiko Saputra	Mohamad Darul ulum	2025-2027	JL. CISADANE Kel.Bendo Blitar	085746540188	30 orang	keagamaan	AHU-00576.AH.02.01.TAHUN 2021
46	Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM)	ILMA AMALIA AL AZHIIM	Nura Salma Salsabila	Rizky Irawan	2023 - 2025	Jl. Cokroaminoto No. 03-05 Blitar	081230683201	5 orang	keagamaan	
47	Jaringan Pendamping Kebijakan dan Pembangunan (JPKP)	SUGENG WIDODO, S.PD	Alexander Sutrisno	Turyana Ramlan	2025 - 2030	Jl. Maninjau E.1 No. 10 Tanjungsari	085334544550	20 Anggota	Organisasi Kemasyarakatan	AHU-0001682.AH.01.07. TAHUN 2015
48	Kesatuan Organisasi Serba Guna Gotong Royong (KOSGORO)	-	-	-	-	-	-	-	Isi	
49	Komando Putra Sang Fajar	HERU SANTOSO	Yudha Nurcholis	Liesmingingsih	2025 - 2030	Jl. Sulawesi No. 90	081219331212	300 Anggota	Organisasi Kemasyarakatan	

50	KOMUNITAS KAIN DAN KEBAYA INDONESIA	DRA. SUNIK ANDAYANI	Indah Ariyani, S.Sos,M.Si	Siti Numalasari Narmi Wijayanti	2021-2026	Jl. Dieng No. 57	081333315454	40 orang	kesamaan scr umum	AHU-000924.AH.01.07.TAHUN 2020
51	KOMUNITAS SEPEDA TUA INDONESIA (KOSTI)	BAMBANG SURATMOKO	Arick L Wijaya	Sri Basuki	2025 - 2029	Jl Musi	081555754744	30 orang	komunitas	
52	KOPRI (PMII WANITA)	LAILA MUFIDA	Jodis Wahyu EPPL	Fitroh Yuvitasari	2024-2024	Jl M.Junaidi Sekardangan	085755172252	20 orang	wanita	AHU-0001356.AH.01.08.TAHUN 2021
53	Korp HMI Wati (KOHATI)	QONIATUL FITRIANA	Selvia putri	Dilla Ayu		JL Sumba gg2 karangtengah	081333173500	225 orang	keagamaan	
54	KOTA BLITAR DEVELOPMENT COMMITTEE (BLITAR-DEC)							10 orang	profesi	
55	Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)	H. PARDI, S.P	Arif Priambodo, M.Kom	Muklisin	2020- 2025	Jl. Kyai Mojo No. 26 b Lingkungan Bendil	081548558414	5.800 Orang	keagamaan	AHU-0001105.AH.01.08 TAHUN 2020
56	LEMBAGA KEMANUSIAAN NASIONAL KOTAK AMAL INDONESIA	WARSITO	Agus Tri Djatmiko	Lely Dwi Aprilia	2024-2029	Jl. Cipemali gg X no. 7 A Ngadiejo Kecamatan Kep.Kidul	081554170803	3 orang	yayasan	AHU-0001479.AH.01.05 Tahun 2023
57	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Disabilitas Pelita Blitar	SUDIATMOKO	CH.M.Hartuti,SE	Martining Tyas	2021-2026	Jl. Ciliwung No. 373	085854420010	20 Orang	Organisasi Kemasyarakatan	AHU-0000901.AH.01.08.TAHUN 2018
58	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Ky. R. M Kasiman	RAHAYU SRI UTAMI	Arinatus Sholikhah	Ririn Anita Setyani	2023-2028	Jl. Masjid No. 15	089804430786	8 orang	yayasan	
59	Lembaga Yayasan Ponpes Mambaus Syafa'atil Qur'an Ngegong Gedog Kota Blitar							18 orang	yayasan	
60	LPK RI	LANCAR P SINAGA							Isi	AHU No. 0046003-AH-01.04.TAHUN 2016
61	LP-KPK	SUMARLIN	Sumari	Kasmani	2025-2028			34 orang	Isi	AHU-0001282.01.08.TAHUN 2020
62	LSM Jaring Investigasi Kejahatan Aparat (LSM Jihat)	IR. JOKO TRISNO MUDIYANTO	Tri Subur M	M. Agus .Rosidi			085735388880	3 orang	Isi	SKT NO : 1535-00-00/262/XII/2020
63	LSM Soko Limo	MUCHSON, SE	Bowo	Agung		Jl. Ploso No.12	085855602222	5 orang	Isi	
64	MAJELIS DAERAH KORPS ALUMNI HIMPUNAN MAHASISWA ISLAM (MD KAHMI)	AGUS SETYO SPD, MPD	Baharudin , ST	Roni Setriyawan, SE,M.Si	2017-2022	Jl. Gunojoyo No.57 Gedog Kota Blitar	085233365553	30 orang	kesamaan scr umum	AHU.0001626.AH.01.07. TAHUN 2022
65	MAJELIS LUHUR KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA (MLKI)	BUDI KASTOWO, MESERAN, TRIMO RIYONO	Catur Endro Swasono, Rondi Puspito	Yunita Dwi Saputra, Nurdiana Efendi	2022-2027	CPM Blok C No.9 Kel Kep.Kidul Kec.Kep.kidul	08125207891	22 Orang	aliran kepercayaan	AHU-00554.60.10.2014
66	Muslimat NU Cabang Blitar	TATIK KUSUMAWATI BA	H. Rofikoh, S.Ag	Hj. Nurliana	2022 - 2027	Jl. Masjid No. 24 Blitar	085731853145	250 orang	keagamaan	
67	NASYIATUL 'AISYIYAH	SEFTI ANA W.				JL. COKROAMINOTO NO.3		100 orang	keagamaan	

68	ORARI Lokal Blitar	YUDI DARMAWANSYAH	Ida bagus gede amawa	Raudy taryana	2021-2026	Jl. Hasanudin no. 13 Bendogerit	81233054911	40 orang	Isi	AHU-0000173.AH.01.08.TAHUN 2022
69	Organda Blitar	IR. HERI ROMADHON				Aks Tubun I/46C	08125233019	25 orang	profesi	
70	Paguyuban Pedagang Asongan Mandiri B2K							40 orang	profesi	
71	Paguyuban Pemerhati Istana Gebang (PPIG) Kota Blitar							10 orang	komunitas	
72	Paguyuban Sang Galih Blitar						08523563347	10 orang	keagamaan	
73	PAGUYUPAN SOSIAL MARGA TIONGHOA INDONESIA	MIKO K. SUGIHARTO	Tan Ngi Hing	Hendra Wijaya	2024-2029	Jl. Mastrip No. 108 Kota Blitar	081334793509	25 orang	keagamaan	
74	Panti Asuhan Muhammadiyah Kota Blitar	SIDHARTA JAROT RYADI	Drh. Sri Widodo	H.Arif Rahman , SE	2021-2025	Jl. Cokroaminoto No. 3 Kepanjenkidul	081335585782	9 orang	yayasan	AHU.0034193.AH.01.12.TAHUN 2022
75	Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten/Kota Blitar	PRIYOKO,S.PD.H	Candra Bagus W S.Ag	Uvi Sulastri S.Pd.H	2024 - 2029	Jl. Ir. Soekarno	082341763222	58 orang	keagamaan	AHU-0007198.AH.01.07.TAHUN 2017
76	PC. IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA (IPPNU) KOTA BLITAR	WASINGATIN CATUR KH (Masih akan pergantian pengurus)				PCNU It 1.Jl. Cisdane 9 RT 01 RW 03 kepanjenkidul		100 orang	keagamaan	AHU.00065.AH.02.01.TAHUN 2020
77	PC. Majelis Agama Budha Theravada Indonesia (MAGABUDHI)	(PMD. SUGANDHO) SUGIANTO GANDHIKA	UPC. Indriyasanti Iswanti	(Upc. Vijjasilo) Wandoyo	2021 - 2026	Vihara Samggijaya Sentul	0342.802616 085649590339	30 orang	keagamaan	AHU.0000537.AH.01.08.TAHUN 2007
78	PC. Nadhlatul ulama (NU)	DR KH HABIB BAWAFI	H. Sarianto, M.Pd.i	H. Misbahul Khoir	2021 - 2026	Jl. Cisdane Blitar	082299331926	250 orang	keagamaan	
79	PD Senkom Mitra Polri Lokal Jatim 07 Blitar	ACHMAD WINARNO, S.PD	Winarto, S.E.	H. Supriyanto	2022 - 2027	JL. IR SOEKARNO 200		50 orang	profesi	AHU-0002085.AH.01.08.TAHUN 2022
80	Peguruan Ilmu Seni Beladiri Pencak Silat Tenaga Dalam "Basmalah"	H.J. SITI SUNARYO	Tono	fitroh Yuvitasari		Jl. Aryo Blitar Rt.3/II Blitar	552912/ 804230	4345 orang	bela diri	
81	PEMUDA BATAK BERSATU DPC BLITAR RAYA							20 orang	kesamaan scr umum	
82	PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA INDONESIA, PUANHAYATI	MUJI ANAH	Anik Sri Widarti	Masturikah	2023-2028	CPM Blok C No.9 Kel Kep.Kidul Kec.Kep.kidul	085856132666	15 orang	aliran kepercayaan	
83	PEPABRI Cabang Kota Blitar	LETKOL (PURNA) MULYONO	Kapten (Puma) chudori	Serma (Puma) Suwandi	2023-2028	Jl. Kombes Pol Duryat No 8 Blitar	0342.801642-7705104	608 orang	profesi	
84	Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Blitar	LAILA MUFIDA	Laili Din	Dita Asri	2021-2026	Jl. Suryat Kota Blitar	085 755 588 801	20 orang	keagamaan	

85	Perkumpulan lembaga Kursus dan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat							10 orang	Isi	
86	Perkumpulan Pedagang Bumi Proklamator/ PERDAMITOR	YOSSY YULIANDRI	Nuswandito Ananto	Siti Sundari	2019 -2024	Jl. Dr. Sutomo 3 Blitar	08123366554	40 orang	profesi	
87	Persada II Kota Blitar	DWI EDY SANYOTO,B.SC	Jodhit Kusumaningrum	Mujiono	2020- 2025	Jl. Dieng no. 26 a	081222432157	9 orang	aliran kepercayaan	
88	Persatuan Dokter Gigi Indonesia	DRG. M.AGUS SABTONI, M.MKES	drg. Kurniasari Nur Rahman	drg. Nurya Handika S	2022 - 2025	Jl. Kusuma Bangsa Kanigoro no.18B	086234791298	19 orang	profesi	
89	Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI)	ERNAWATI	Masih mau reorganisasi			Jl. Perum Puri Kenari Asri Blok J-2 Karangtengah Kota Blitar		100 orang	profesi	AHU.0001611.AH.01.08.TAHUN 2022
90	PERSATUAN ISTRI PURNAWIRAWAN PERIP Blitar	SITI AISYAH MULYONO	Anik Dariani Sahro	Sringatun Matsalam	2023 - 2028	Jl. Kombes Duryat No. 8 Blitar	801642/ 087859260213	325 orang	wanita	AHU-0000829.AH.01.08.TAHUN 2023
91	Persatuan Purnawirawan Polri (PP POLRI)	SAMSUDINI, S.SOS	Eko Mahendro, S.Sos wakil sek Ny wahyuni	Budi Santoso	2021 - 2026	Jl. Legundi No. 418 Blitar TELP. 0342.808864	'08133430734	356 orang	profesi	AHU-0046970.AH.01.07.TAHUN 2016
92	PERSATUAN PURNAWIRAWAN TNI-AD	KOLONAL ARH. PURN. TUGIYANTO	Peltu AD Purn. Suwadjji	Serma AD Purn. Sahro	2022-2027	Jl. Sudanco Supriyadi Blitar	085731944515	325 orang	profesi	AHU-63.AH.01.17.Tahun 2013
93	Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI)	SAMSURI	Yustinus Andreas Ramly	Leli Mulya Hidayat	2024 - 2025	JI Pinus 10 kepkidul	810598 - 081245962517	40 orang	kesamaan scr umum	
94	Persatuan Wanita Olah Raga Seluruh Indonesia (PERWOSI)	MASIH DI KOORDINASIKAN DENGAN BU CUPLIK	Masih dalam Proses			Jl. S. Supriyadi Nomor : 22 Blitar	0342801472	50 orang	wanita	
95	Persatuan Wredatama RI (PWRI)	DWI AGUS BASUKI	H.M Sobiri,S.Pd.I	Rasunah S.Pd	2023 - 2028	Jl. Cokroaminoto no. 3 - 5	081225504443	20 orang	kesamaan scr umum	
96	PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE (PSHT)	MISKAN HADI, ST	Imam Safii, S.Ag	Ana Mundazirotul Maghfiroh	2022- 2027	Perum Puri Kenari Asri Blok H-11 Kota Blitar	081335939006	4221 orang	bela diri	AHU-00554.60.10.2014
97	PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE (PSHT)	SRIYONO WAHYU UTOMO	Hermawan	Hamdan Zulfikri K	2022-2027	Jl. Imam Bonjol Gg. VII No. 2B Rt.001 Rw. 006 Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan	081515196645	50 orang	bela diri	AHU-0005248.AH.01.07.TAHUN 2025
98	Perserikatan Muhammadiyah Cabang Kota Blitar	LUKIARTO, SKM	Nur Rozik,S.Kom	Kustomo	2022 - 2027	JI Cokroaminoto no. 3	08121659193	9 orang	keagamaan	
99	Perserikatan Muhammadiyah Kec. Kep.kidul Kota Blitar					Jl. Kelud No. 70. B Blitar		30 orang	keagamaan	
100	Pimpinan daerah Aisyiyah Kota Blitar	DR. WASINGAH	Tiwik Kusriani,S.Pd	Enywati	2022-2027	Jl. Cokroaminoto No. 3 Blitar	082141713505	17 orang	keagamaan	
101	PIMPINAN DAERAH PEMUDA MUHAMMADIYAH KOTA BLITAR	KHABIB MULYA AJI WIDODO, S.KM	Dary Abiyantonpo, ST	dr. Arga Budiono Sp. B	2023 - 2027	JL. Ir. SOEKARNO NO. 13 KOTA BLITAR	085735910091	100 orang	keagamaan	
102	Pimpinan Umum Persatuan Korps Pembela Tanah Air (Korps Peta)	ARIFAN						35 orang	kesamaan scr umum	

103	Piveri Kab / Kota Blitar	SRI RAHAYUNINGSIH MUGENI	Sukartati Marsidi	Sukesi Rusnainy	2022 - 2028	Jl. Tanjung no. 1 Blitar	081358068026	102 orang	wanita	AHU.0000507.AH.01.08.TAHUN 2023
104	Puma Paskibraka Indonesia Kota Blitar	EVI AYU MAYASARI	Nissa Dina Sari	Helen Enjelika	2024 - 2029	Jl. Ciliwung No. 28 Blitar	082244281789	78 orang	kesamaan scr umum	AHU-0000522.AH.01.08. TAHUN 2016
105	Rakyat Tuntut Amanah Keadilan (RATU ADIL)	MOHAMMAD TRIYANTO						19 orang	Isn	
106	RAPI Blitar	A. KET. : DRS. TRI IMAN P, M.SI	vakum, mau ganti pengurus			Jl. Kelud kopl. Stadion Supriyadi Blitar	085780142256	90 orang	Isn	AHU-0000520.AH.01.08.TAHUN 2022
107	Relawan GARDA NUSANTARA	ARIK GUNARIYANTO						15 orang	komunitas	
108	Salimah Kota Blitar	UMUL FADILAH,S.SI. APT.	Ery Mintarsih, S.E	Erna Wahyuningsih,S.Ke p.NS	2021- 2026	Jl. Musi 21 Kauman	082330538218	13 orang	keagamaan	AHU-0000395.AH.01.08.TAHUN 2020
109	Senam Tera Indonesia (STI) Cabang Kota Blitar	HERU SANTOSO	Mariyanah	Sukesi	2025-2029	Jl. Cisadane	081252457222	50 orang	komunitas	
110	SENI BELADIRI GERAK CEPAT BERUANG PUTIH	DWI SASONGKO MARDIONO	Wahyu awaludin	Dra. Sulastri	2023-2028	Jl. Wr, Supratman no 130 Bendogerit Sananwetan	081367736739	150 orang	bela diri	AHU-082495.AH.01.30.TAHUN 2023
111	Serikat Buruh Merdeka (SBM) Blitar	MAHENDRA SETIA BUDI.						5 orang	Isn	
112	SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia)	EKO SETYO MUTAM,AMI ST	Sugeng Arifina	Purwanto	2022-2027	Jl. Siping no. 63 Bendogerit	082140511561	38 Orang	Organisasi Kemasyarakatan	AHU-0000901.AH.01.08.TAHUN 2018
113	Wanita Khatolik Republik Indonesia (WKRI) Cabang Blitar	CHATERINA SARTIYAH	Veronika Rua Wantri Waheni	Albertin Renni Ratnasari	2025 - 2028	Jl Cepaka no. 10 Kota Blitar	08564949979	152 orang	keagamaan	SK MENKEHAKIMAN :C2-7095 HT.01.06.Tahun 1996
114	Yayasan Al Ghifari	BASUKU RAHMAT, SH	Taufiq Rachman Hakim	Sofia Dewi, S.Pd	2024-2029	Jl. Sumba No. 38 Karangtengah	08123484742	6 orang	yayasan	
115	Yayasan Al Istiqlal Hidayatullah Blitar	TAUFIQ SHILIHIN						5 orang	yayasan	
116	YAYASAN AL MUALLIMIN AL BLITARI CABANG KOTA BLITAR	H. MUALIM	M.Arifin, S.Pd	Amin Tri Munarsih S.Pd	Tidak Ada Periode	Jl. Kali Lekso RT.02 RW.01 Pakunden	085736177819	63 orang	yayasan	AHU-0018440.AH.01.12.TAHUN 2025
117	Yayasan Al-Istiqal	ZAINUDIN KHOIRI						18 orang	yayasan	
118	Yayasan Djaladri	ANDI YUWONO, S.SOS.						15 orang	yayasan	
119	Yayasan Ibadurrohman Blitar	M. MANSUR SHODIQ	Asfiatin Masrurroh	Nuriyatul Aliyah	2025-2030	Jl. Kol Sugiono Gg. Masjid Ngegong ,Gedog, Blitar	082139780522	15 orang	yayasan	AHU-0005601.AH.01.04.Tahun 2016
120	Yayasan Iman Blitar	DRS. RA. SUDARWADJI						200 orang	yayasan	
121	Yayasan Indonesia Baru	PURWANTO, SPD						12 orang	yayasan	

122	Yayasan Klenteng Poo An Kiong	DG THIN SOEK LIONG				Sulit dihubungi		15 orang	yayasan	
123	Yayasan KY. R. Moh. Kasiman Blitar	ZARKONI				Belum ada Sk		6 orang	yayasan	
124	Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Blitar (YLKI)	M. HANAFI, SH						6 orang	yayasan	
125	Yayasan Mambaul Hisam Pakunden – Blitar	H. ALI MUSTOFA	Binti Maslahan	Affatus Sa,adah	Sariato	Jl.Asahan No. 52 Blitar	Tidak Punya Nomor HP	5 orang	yayasan	AHU-0023949.AH.01.04.Tahun 2015
126	Yayasan Monumen Syuhada' Haji	H. ZAENAL EFENDI, MBA	Drs. Masjudi, M.Ag	Dzulfikar Zaki Fuad, SE	2024-2027	Jl. Lekso No. 12 Blitar	0811363919	22 Orang	yayasan	AHU-0013090.AH.01.12.TAHUN 2021
127	YAYASAN OMAH SURGA							9 orang	yayasan	
128	Yayasan Patria Mulia (YPM) Blitar	FATHUR ROCHMAN						15 orang	yayasan	
129	Yayasan Pendidikan Luar Biasa	DRS. SUGIARTO				Jl. TGP No. 28 Blitar		8 orang	yayasan	
130	YAYASAN Perkumpulan Sahabat Perempuan Anak Kota Blitar					Tidak ketemu dicari lokasinya		5800 orang	yayasan	
131	Yayasan Persatuan Perguruan Taman Siswa	DRS. SAIFUL RIFA'I, M.PD	Dra. Tri Pangestu Andayani	Suisdiati, S.Pd	2023-2028	Jl. A.Yani No. 100 Blitar	085648744806	7 orang	yayasan	AHU.219.AH.02.01.TAHUN 2009
132	Yayasan Ponpes Bustanul Muta'allimin Blitar	KH.MUHTAR LUBBY,MA	Alfin Salam, S.Pd	Samsul Ghufroon, S.Pd.I	Untuk Yayasan tidak ada periodenya	Jl. Barito no. 2 Blitar	082229900833	36 orang	yayasan	AHU-0025060.AH.01.04.Tahun 2015
133	Yayasan PYPLP - PGRI	TRIMO, S.PD,M.PD	Muryat, S.Pd	Dra. Siswari	2023- 2025	Jl. A.Yani No. 100 Blitar	081554921993	6 orang	yayasan	AHU-0000719 AH01.12 TAHUN 2024 TANGGAL 11 JANUARI 2024
134	Yayasan Rukun Ginawa Sentosa (YARGIS)	HARTOYO	Usman Ramdani	Robi Afrijal	Tidak tentu	Jl. Ir. Soekarno No. 372 Kel Sentul Kec.Kep.kidul	087889145707	20 orang	yayasan	AHU-8351.AH.01.04 Tahun 2011
135	Yayasan Shidiqiyah	RUSENO HADI	Moh. Bahroni	Hariri	2022-2027	Jl. Gajah Mada RT.04 RW.03 Wlingi Blitar	081334188836	29 orang	yayasan	AHU.0007564.AH.01.07.TAHUN 2015
136	Yayasan Sunangiri	MOCH.SUBAKIR	M. Agus Johar Tantowi	Misbachul Choir	2016 s/d 2026	Jl. Tidar No. 17 RT. 02 RW 04 Kel.Kuman Kec. Kep.Kidul	081217878044	12 orang	yayasan	AHU-0037550.AH.01.04.Tahun 2016
137	Yayasan Taman Kanak-Kanak Pertiwi					Menunggu jawaban dari Kepala Sekolah TK		25 orang	yayasan	
138	Yayasan Taman Pendidikan Islam (YATPI) Blitar	DRS. SJAMBUKA						15 orang	yayasan	
139	Yayasan Taman Pendidikan PA "TARBIYATUL FALAH "MA'RUF AN NUR BLITAR	KH.ABDIL KARIM MUHAIMIN						15 orang	yayasan	
140	Yayasan Yohanes Gabriel Wijana Sejati	RD. ANTONIOS IWAN SETYABUDI,S.S.M.M	Drg. Winny Irawati	Rita Maria Hartiwi, S.Pd	2025-2026	Jl. Diponegoro No. 36 Kota Blitar	082231337222	21 orang	yayasan	AHU-0011011.AH.01.12.TAHUN 2025

142	Yayasan Surya Nuswantara Wilwatikta	ESTI HANDAYANI	Nurrulia Ulawaliani	Nanik Rahayu		Jl., Soekarno No. 61 Kota Blitar	085755591687		Yayasan	AHU-0006244.AH.01.04.Tahun 2022
-----	-------------------------------------	----------------	---------------------	--------------	--	----------------------------------	--------------	--	---------	---------------------------------

ORMAS YANG TIDAK AKTIF ATAU BUBAR

NO	NAMA ORGANISASI	SUSUNAN PENGURUS			PERIODE	ALAMAT/TELP.		JUMLAH ANGGOTA	JENIS ORGANISASI	KETERANGAN BADAN HUKUM
		KETUA	SEKRETARIS	BENDAHARA						
1	Lembaga Pengembangan Sosial Dan Lingkungan Hidup / Yayasan Nasional Blitar	-	-	-	-	-	-		yayasan	Tidak Aktif
2	Perguruan Senam Tenaga Dalam Bhirawa Seta	R. HENDRO MS.				Jl. Slamet Riyadi 80 Blitar	Tlp.	15 orang	bela diri	Tidak Aktif
3	Perkumpulan Fajar Jaya Dharma Sosial Blitar	SINTAWATI				Jl. Ir. Soekarno 345 Sentul Blitar	081235 290	10 orang	aliran kepercayaan	Tidak Aktif
4	Persekutuan Do'a Ekklesia Blitar	BAMBANG INDRA MISIANTO				Jl diponegoro	Telp. 815544	50 orang	keagamaan	Tidak Aktif
5	Yayasan Gerontologi Abiyoso Blitar	-	-	-	-	-	-	-	yayasan	Bubar
6	Yayasan H Sabih Goenadjaya dikoesoemah Cabang Blitar	-	-	-	-	-	-		yayasan	Tidak Aktif
7	Yayasan Harmoni	-	-	-	-	-	-	-	yayasan	Tidak Aktif
8	Yayasan Kalimasada (Kajian Penelitian Masyarakat Antar Daerah)	-	-	-	-	-	-		yayasan	Tidak Aktif
9	Yayasan Kathalisma 75	-	-	-	-	-	-	-	yayasan	Bubar
10	Yayasan Lembaga Mitra Usaha Masyarakat	-	-	-	-	Tidak ketemu dicari lokasinya	-			Tdak Aktif
11	Yayasan Mandiri	-	-	-	-	-	-	27 orang	yayasan	Tidak Aktif
12	Yayasan Nasional	-	-	-	-	-	-		yayasan	Tidak Aktif
13	Yayasan Paraphisikologi Semesta	-	-	-	-	-	-	-	yayasan	Bubar
14	Yayasan Pembangunan Kesejahteraan Islam	-	-	-	-	-	-	15 orang	yayasan	Tidak Aktif
15	Yayasan Pendidikan Kebudayaan Nasional (YAPENAS)	-	-	-	-	-	-		Yayasan	Bubar
16	Yayasan Pendidikan SMP Sore 2 Blitar	-	-	-	-	-	-		yayasan	Tidak Aktif
17	Yayasan Tunas Harapan Bangsa	RETNO WIDODO	Gak ketemu					12 orang	yayasan	Tidak Aktif

DAFTAR PARTAI POLITIK KOTA BLITAR PESERTA PEMILU TAHUN 2024
BERDASARKAN DATA SIPOL KPU

No.	Nama Partai	Alamat Kantor	Telp. Kantor	Ketua Partai
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	Jalan Serayu No. 44 Rt 02 Rw 05 Bendo Kepanjenkidul Kota Blitar	085755481643	Yasin Hermanto
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	Jl. Timor No.42	081330800309 (T.Hing)	Endro Hermono
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	JL. Dr. Wahidin 59A	085755016875 (sretariat/Hendra)	Syahrul Alim
4	Partai Golongan Karya (GOLKAR)	Jl. Kalimantan 81	(0342) 802673	Moch. Hardi Usodo
5	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	JL. Bunaken No. 9	Yasin Hermanto	Hermanto
6	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA)	Jl. Palem No 23 Rt04 Rw04 Rembang Sananwetan Kota Blitar	08133209934 (Ahmad Hunaifi)	Muhammad Arifin '082299099950
7	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	Perum Kenari Aari Blok A-19 RT 004 RW 003	(0342) 809065	Leo Sudilaksono
8	Partai Kebangkitan Nusantara	JL. Veteran 53 RT.03/08	081336785994	Mohamad Apie Dhelpilia Suhariyanto
9	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	JL. Dr. Sutomo No. 3	08123366554	Yossy Yuliardi
10	Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)	Jl. Borobudur 114 Bendogerit, Sananwetan, Kota Blitar	085878487186	Drs. Sudarmadiono, M.Pd
11	Partai Amanat Nasional (PAN)	Griya Melati Indah I Blok B/10	0811106111	M. Heri Romadhon
12	Partai Bulan Bintang (PBB)	Jl. Cilincing No.04 RT 01 RW 09	085655633018	Sugeng Wahyudi
13	Partai Demokrat	Jl. Sumba No. 97 RT. 002 RW. 009	081233989995	Rido Handoko. S. Pd
14	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	Grand Sentul Blok C No. 02 RT. 02 RW. 05	082330678934	Yudianto
15	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)	Jl. Kawi RT.004 RW.002	081234973433	Herry Widianto
16	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	JL. Kalibrantas No. 76 Kauman Kepanjenkidul Kota Blitar	0342814690	Agus Zunaidi, SE
17	Partai Ummat	Jl. Ambalat 14A RT001/RW013, Kel. Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar	085856993777 (P Herry)	Permana Bima Syahputra

